

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 13/KU.01.00/JI/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) PADA SISTEM APLIKASI TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, memandang perlu menetapkan Pengguna (*user*) Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengguna (*user*) pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan penunjukan dan pengangkatan pengguna (*user*) pada sistem aplikasi tingkat instansi (*sakti*) di lingkungan sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur tahun anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang

- Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran,

- Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan PengawasPemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) PADA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026
- PERTAMA : Menetapkan pengguna (*user*) pada sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (*sakti*) di lingkungan sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur tahun anggaran 2026 yang Namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengguna (*user*) pada sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (*sakti*) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan dalam aplikasi keuangan tingkat instansi (*sakti*) ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : **SALINAN** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Peringgal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran
Nomor : 13/KU.01.00/JI/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang Penunjukan Dan Penetapan
Pengguna (User) Pada Sistem Aplikasi Tingkat
Instansi (Sakti) Di Lingkungan Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2026

**PENGGUNA (USER) PADA SISTEM APLIKASI TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	JUSUF, S.Si., M.A 19700527 199803 1 001 IV/c / Pembina Utama Muda	Approver	KPA
2	LAMBOK WESLY SIMANGUNSONG 197403011993031004	Validator	PPK
3	PITUT FARIANA 19860226 201503 2 006 III/c / Penata	Approver	PPSPM
4	MEYITALIANA FACTMAWATI 19920508 201503 2 003 III/b / Penata Muda Tk I	Bendahara	BP, Operator Pembayaran
5	FERIKA AMALIA 19941013 201902 2 003 III/a / Penata Muda	Admin, Operator	Administrator, Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Validator Aset
6	TOMMY YOGA ADITAMA 19900812 202012 1 003 III/a / Penata Muda	Operator	Operator Aset
7	G Hassani Nabilah Qisthi 19940616 202012 2 010 III/a / Penata Muda	Operator	Administrator, Operator Anggaran, Operator Pembayaran
8	MUHAMMAD NAUFAL FATHURRAHMAN 200012042025011002	Operator	Operator Komitmen, Operator Pembayaran, Operator Pelaporan
9	FAIL ANGRI NAWAWI 200010112025011002	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
10	AVVALLA MAULIDHA RACHMA 200007242025012004	Operator, Bendahara	Operator Komitmen, Operator Pembayaran, Operator Pelaporan, Operator Persediaan, BPP
11	BAGUS PRIYO UTOMO 199208092024211012	Operator	Operator Anggaran, Operator Laporan
12	RICHE RAHMAWATY SUMAKA 197906282000032001	Validator	PPK
13	GALIH ARYO BRAMANTYO 199208092024211012	Operator	Operator Pembayaran
14	ABDUL MUIS 199307152020121004	Operator	Operator Aset, Operator Persediaan

15	VIBIANOVA CANDRA KIRANA 200003052025052006	Operator	Operator Aset, Operator Persediaan
16	JESSICA RAHMA PRILLANTIKA 199504192020122008	Operator	Operator Aset, Operator Persediaan
17	ABDUL AZIS 197802142011011003	Validator	PPK
18	DIANA HOLIFA 197802152007012009	Bendahara	BPP
19	NINA MAYASARI 198609292025212037	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
20	ARIS HADI SAPUTRA 198002082010011009	Validator	PPK
21	FEDORA ADI BRATA 199608242022031002	Bendahara	BPP
22	FATIMATUZZAHRO 199512242023212037	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
23	PURWANTO 196905211993021001	Validator	PPK
24	WARAS HARIANTO 197510222010011003	Bendahara	BPP
25	VIVI LESTARI 199105042025212048	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
26	IHDA ROHMAWATI 198209082009012009	Validator	PPK
27	ROHMAN ASHARI 197602152010011001	Bendahara	BPP
28	DEWI LESTARININGSIH 197912282025212020	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
29	ANUNG WIBOWO 19760120 201101 1 006	Validator	PPK
30	ADITYA SURYANA S 199511172019021001	Bendahara	BPP
31	ARIS HARIYANTO 198808272025211025	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
32	PRISMA AGUSTIAN PRASETYA 198508242019021001	Validator	PPK
33	MEYTALIANA FACTAMAWATI 19920508 201503 2 003	Bendahara	BPP
34	RIZAL INDRA PRADANA 199405302025211026	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
35	TOMMY YOGA ADITAMA 19900812 202012 1 003	Validator	PPK
36	BAYU WIJANARKO 197801132008011008	Bendahara	BPP

37	FAJAR DWI YUNANDA 199406212025211026	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
38	ARIS HADI SAPUTRA 198002082010011009	Validator	PPK
39	GALIH AGUNG TRIWIBOWO 198505172014081001	Bendahara	BPP
40	ALFI WULANDARI 199509262025212026	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
41	AGASTYA YOGA RINALDHY 199305232015071002	Validator	PPK
42	BAYU SYAILENDRA 198912272019021001	Bendahara	BPP
43	AZZA FIIKA ZAHRA HAQIQI 200102112025052003	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
44	LAMBOK WESLY SIMANGUNSONG 197403011993031004	Validator	PPK
45	MUHAMMAD NAUFAL FATHURRAHMAN 200012042025011002	Bendahara	BPP
46	CARISMA PUTRI MULIA 199304262025052002	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
47	ABDUL BARI 197710242008011003	Validator	PPK
48	KUSNO AFANDHI 198212272008011007	Bendahara	BPP
49	FARIDA MUTIA AGUSTIN 199208192023212042	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
50	JOKO NUGROHO 197806022006041018	Validator	PPK
51	WAHYUNINGTYAS 19970204 202203 2 001	Bendahara	BPP
52	WAHYU HIDAYAT 198902262025211025	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
53	ACH SUPRAYOGI 197803212014071003	Validator	PPK
54	AGUS SUSANTO 198112252010011004	Bendahara	BPP
55	AGUS EKO SETIAWAN 198903112025211022	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
56	MASWIJAYA SISWA RAKHMAN 198205272006041015	Validator	PPK
57	MUHAMMAD PURWANTO 198410202009031001	Bendahara	BPP
58	MOH. NURKAFI 197608182025211026	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen,

			Operator Pembayaran
59	MIFTAH FARID JAMALUDDIN 198510072010011013	Validator	PPK
60	FEDORA ADI BRATA 199608242022031002	Bendahara	BPP
61	ALI FIKRI 198605062023211015	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
62	EKO BUDIHARTO UTOMO 197305172008011013	Validator	PPK
63	AKH. DAHLAN YULIANTO 198007072008011018	Bendahara	BPP
64	UBAIDILLAH 198807142025211027	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
65	KIRNADI 197906162011011007	Validator	PPK
66	FAIL ANGRI NAWAWI 200010112025011002	Bendahara	BPP
67	DODIK SETYAWAN 198610012025211037	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
68	SETIAWAN 197602052009011006	Validator	PPK
69	IBNU HAMJAH SINAMO 199612062022031001	Bendahara	BPP
70	NUNING SUGIARTI 198010302025212014	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A